



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 11364-11370

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Terhadap PAD Pada BAPENDA Provinsi Lampung

Novakartika Yanti¹, Novalita², Nur Salma³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Mitra Indonesia

¹novakartika@gmail.com, ²novalitadwinov56@gmail.com, ³salma@umitra.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas dan efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data berupa data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan data realisasi penerimaan pajak daerah yang diperoleh langsung dari Kantor Bapenda Provinsi Lampung. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, di mana seluruh data yang tersedia dijadikan sebagai objek penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas untuk memastikan kelayakan model regresi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda serta uji hipotesis yang terdiri dari uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan efektivitas dan efisiensi pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, secara parsial kedua variabel independen tersebut juga memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah berperan penting dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

1. Latar Belakang

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah semua pajak-pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam membangun dan mengurus rumah tangga sendiri, maka pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menggali sumber – sumber keuangan yang ada di daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah pendapatan daerah, khususnya pada otonomi daerah.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber keuangan atau penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 6 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran tanpa kewajiban untuk dikembalikan. Komponen pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di antara komponen tersebut, PAD memiliki peranan

strategis karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, demikian pula bagi pemerintah daerah. Tanpa adanya penerimaan pajak yang optimal, sebagian besar kegiatan pemerintahan dan pembangunan akan sulit untuk dilaksanakan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola perpajakan daerah sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan. Pajak daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah seringkali diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita, yang mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan standar hidup masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan yang efektif dan efisien menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara itu, pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Keberagaman jenis pajak tersebut menunjukkan besarnya potensi pajak daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola secara optimal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap, sistematis, dan objektif mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi berdasarkan data numerik. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta menjelaskan hubungan antarvariabel berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan pengolahan data. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel secara objektif serta analisis data menggunakan teknik statistik.

Desain penelitian diawali dengan proses identifikasi permasalahan yang bersifat kuantitatif, kemudian permasalahan tersebut dibatasi dan dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah. Rumusan masalah tersebut selanjutnya dijawab dengan menggunakan landasan teori dan konsep yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian. Desain penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan serta pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah pajak daerah, sedangkan variabel dependen (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat diukur secara matematis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan serta data realisasi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung. Data yang digunakan merupakan data resmi yang telah didokumentasikan oleh instansi terkait sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dokumen tersebut meliputi laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan laporan Pendapatan Asli Daerah pada periode penelitian. Metode dokumentasi dipilih karena data yang dibutuhkan telah tersedia dalam bentuk arsip dan laporan keuangan yang disusun secara sistematis oleh instansi pemerintah daerah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji

autokorelasi untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis regresi. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y=a+bX+e,$$

di mana

Y adalah Pendapatan Asli Daerah,

X adalah pajak daerah,

a adalah konstanta,

b adalah koefisien regresi, dan

e adalah error term.

Tahap selanjutnya adalah uji hipotesis, yang meliputi uji simultan (Uji F) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, serta uji parsial (Uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, dilakukan pula uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for Social Science (SPSS) guna memperoleh hasil analisis yang akurat dan objektif.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan menggunakan metode statistik dengan bantuan aplikasi SPSS untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dibahas dengan mengaitkannya pada teori yang relevan serta penelitian terdahulu guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap temuan penelitian. Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah didalam regresi antara variabel independent (X) dan dependen (Y) mempunyai distribusi yang normal atau tidak.

Tabel 1
Uji Normalitas

		Pendapatan Asli Daerah ^k	Efektivitas_Pajak	Efisiensi_Pajak
N		16	16	16
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	880.94	122.50	45.75
	Std. Deviation	149.061	22.106	8.752
Most Extreme Differences	Absolute	.116	.160	.186
	Positive	.116	.138	.186
	Negative	-.100	-.160	-.133
Test Statistic		.116	.160	.186
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.143 ^c

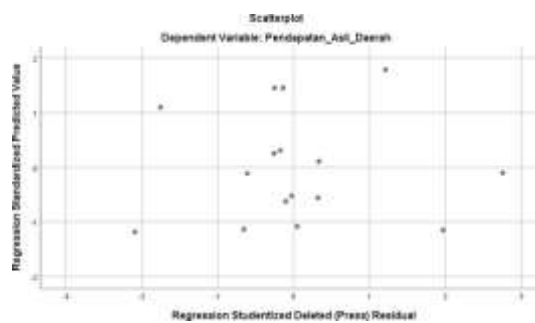
Nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai probabilitas > 0,05 data terdistribusi secara normal. Pendapatan asli 0,200 > 0,05, efektivitas pajak 0,200 > 0,05 dan efisiensi pajak 0,143 > 0,05.

Uji Multikolinieritas prasyarat yang harus terpenuhi dalam medel regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance infiation factor*).

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.593	1.687
.593	1.687

Berdasarkan Nilai Tolerance Jika nilai tolerance $0,593 > 0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF $1,687 < 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.



Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil diatas tidak terdapat adanya titik – titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, dan titik – titik pada scatterplot di atas menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y menyebar secara acak pada sumbu Y. Hal tersebut artinya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.972 ^a	.944	.935	37.890	2.009

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi akan digunakan uji durbin watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Durbin watson harus terletak $> 1,000$ dan $< 3,000$ dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin Watson adalah $2,009$ dimana $1,000 < 2,009 < 3,000$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.917	59.081		.676	.511
	Efektivitas_Pajak	5.669	.575	.841	9.861	.000

	Efisiensi_Pajak	3.204	1.452	.188	2.207	.046
a. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah						

Sumber : Hasil Olah Data Penulis SPSS

Berdasarkan tabel di atas di peroleh koefisien untuk variabel bebas efektivitas pajak = 5.669, efisiensi pajak = 3.204 dan a sebagai konstanta sebesar 39.917 sehingga model regresi yang diperoleh adalah: $Y = 39.917 + 5.669 X1 + 3.204 X2$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Efektivitas Pajak

X2 = Efisiensi Pajak

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan dan diambil keputusan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 39.917 menyatakan bahwa jika variabel independen nilainya adalah 0 (nol), maka Pendapatan Asli Daerah 39.917
2. Koefisien regresi Efektivitas Pajak (X1) sebesar 5.669 menyatakan bahwa jika variabel Efektivitas Pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 5.669.
3. Koefisien regresi Efisiensi Pajak (X2) sebesar 3.204 menyatakan bahwa jika variabel Efisiensi Pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 3.204.

Tabel 5 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	314625.021	2	157312.510	109.573	.000 ^b
	Residual	18663.917	13	1435.686		
	Total	333288.938	15			

Nilai Fhitung sebesar 109.57 Ftabel = ($df1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$, $df2 = n - k = 48 - 3 = 45$) ($109.57 > 3,024$) dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain bahwa Efektivitas Pajak dan efisiensi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain bahwa Efektivitas Pajak dan Efisiensi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 6 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.917	59.081		.676	.511
	Efektivitas_Pajak	5.669	.575	.841	9.861	.000
	Efisiensi_Pajak	3.204	1.452	.188	2.207	.046

a. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah

Sumber : Hasil Olah Data Penulis SPSS

Dasar pengambilan keputusan hasil dari uji t yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. T tabel dapat diketahui dengan mencari derajat kebebasan ($df = n - k$) = $48 - 3 = 45$. Sehingga didapat nilai t tabel adalah 2,014. Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- a. Nilai t hitung pada variabel efektivitas pajak (X1) sebesar 9,861. Nilai t hitung > t tabel yaitu $9,861 > 2,014$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Pajak (X1) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen atau Pendapatan Asli Daerah
- b. Nilai t hitung pada variabel Efisiensi Pajak (X2) sebesar 2,207. Nilai t hitung > t tabel yaitu $2,207 > 2,014$ dan nilai signifikansi $0,046 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Efisiensi Pajak (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (Uji F), diperoleh nilai Fhitung sebesar 109,573 yang lebih besar dibandingkan Ftabel sebesar 3,024 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak dan efisiensi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinilai layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Secara teoritis, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak daerah sebagai sumber utama PAD. Ketika pajak dikelola secara efektif dan efisien, maka penerimaan daerah dapat dioptimalkan dan kemandirian fiskal daerah dapat meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Wulandari (2019) serta Sari dan Putra (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi pajak daerah secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak serta kemampuan menekan biaya pemungutan pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja PAD. Nilai Fhitung yang sangat tinggi juga mengindikasikan bahwa kontribusi kedua variabel tersebut terhadap PAD tergolong kuat, sehingga pajak daerah masih menjadi tulang punggung utama dalam struktur pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), variabel efektivitas pajak (X1) menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,861 yang lebih besar dari t tabel 2,014 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Menurut Halim (2016), efektivitas pajak mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pajak yang telah ditetapkan dalam anggaran. Semakin tinggi tingkat realisasi pajak terhadap target yang ditetapkan, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Temuan ini mendukung penelitian Putri dan Handayani (2021) serta Ramadhan (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas pajak memiliki pengaruh dominan terhadap PAD dibandingkan variabel lain.

Secara analitis, dominannya pengaruh efektivitas pajak menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak lebih menentukan dibandingkan sekadar efisiensi biaya pemungutan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi pajak daerah yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran basis data pajak, ekstensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum pajak daerah.

Selanjutnya, variabel efisiensi pajak (X2) juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai t hitung sebesar 2,207 > t tabel 2,014 dan nilai signifikansi $0,046 < 0,05$. Menurut Mahmudi (2015), efisiensi pajak berkaitan dengan perbandingan antara biaya pemungutan pajak dan penerimaan pajak yang diperoleh. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan pajak, maka semakin efisien kinerja pemungutan pajak tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Astuti dan Nugroho (2020) serta Prasetyo (2019) yang menyatakan bahwa efisiensi pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD melalui pengendalian biaya pemungutan pajak.

Meskipun pengaruh efisiensi pajak lebih kecil dibandingkan efektivitas pajak, analisis peneliti menunjukkan bahwa efisiensi tetap memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD bersih. Efisiensi pajak mencerminkan tata kelola perpajakan daerah yang baik, profesional, dan akuntabel. Tanpa pengendalian biaya pemungutan yang memadai, peningkatan penerimaan pajak tidak akan sepenuhnya berdampak optimal terhadap PAD.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi pajak daerah, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan pajak daerah, khususnya dari sisi efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan upaya peningkatan

realisasi pajak dengan pengendalian biaya pemungutan agar PAD dapat meningkat secara berkelanjutan dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak dan efisiensi pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, baik secara simultan maupun parsial. Efektivitas pajak menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi PAD, yang menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak sangat menentukan peningkatan pendapatan daerah. Sementara itu, efisiensi pajak juga berperan penting melalui pengendalian biaya pemungutan pajak sehingga penerimaan bersih daerah dapat lebih optimal. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi pajak daerah, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas pengelolaan pajak yang efektif dan efisien guna mendukung kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Referensi

1. Aji Bayu Purnomo, Kirya, I. K., & S. G. P. A. J. (2015). Analisis sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 3(1), 45–56.
2. Al Fatimah Ainaya. (2020). Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018–2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 101–115.
3. Astuti, D., & Nugroho, A. (2020). Pengaruh efisiensi dan efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 85–97.
4. Billah, H. M., & Wijaya, R. S. (2022). Pengaruh PAD, DAU, inflasi, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2437–2447.
5. Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
6. Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
7. Halim, A. (2017a). *Akuntansi keuangan daerah (Edisi revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
8. Halim, A. (2017b). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
9. Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
10. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
11. Prasetyo, B. (2019). Analisis efisiensi pemungutan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45–58.
12. Puspitasari, E. R. A. (2014). Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora tahun 2009–2013. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
13. Putri, R. A., & Handayani, S. (2021). Pengaruh efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 23–34.
14. Ramadhan, M. R. (2018). Pengaruh efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 112–124.
15. Resmi, S. (2016). *Perpajakan (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
16. Riadi, E. (2016). *Statistika penelitian*. Yogyakarta: Andi.
17. Sari, N., & Putra, D. A. (2020). Efektivitas dan efisiensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(2), 61–74.
18. Wulandari, P. (2019). Analisis kinerja pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 39–52.